



### JEPANG ADOPTI PAKET EKONOMI 113 MILIAR USD UNTUK LAWAN INFLASI

PM Fumio Kishida dalam pertemuan dengan anggota parlemen koalisi yang berkuasa pada Kamis (2/11) mengungkapkan, Pemerintah Jepang mengadopsi paket ekonomi senilai lebih dari 17 triliun yen (113 miliar dolar AS) sebagai bagian dari upaya untuk membantu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan harga. Langkah-langkah baru dalam paket tersebut mencakup pemotongan pajak sebesar 40.000 yen per orang dan pembayaran sebesar 70.000 yen kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

## Jerman Berencana Permudah Akses Pencari Suaka ke Pasar Tenaga Kerja

Nantinya para pencari suaka diizinkan bekerja sesudah tiga atau enam bulan setelah kedatangan mereka.

**JERMAN(IM)** - Kabinet Jerman menyepakati undang-undang yang memungkinkan pencari suaka untuk bisa mulai mencari nafkah di Jerman lebih cepat. Namun di sisi lain, undang-undang ini bakal memperketat hukuman bagi para penyelundup manusia.

Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan, nantinya para pencari suaka diizinkan bekerja sesudah tiga atau enam bulan setelah kedatangan mereka.

Sebelumnya, butuh waktu minimum sembilan bulan untuk bisa masuk ke bursa kerja. Namun undang-undang baru ini masih memerlukan

persetujuan parlemen.

Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck mengatakan, gagasan di balik undang-undang tersebut adalah untuk memastikan bahwa pencari suaka bisa "keluar dari sistem tunjangan sosial dan mendapatkan pekerjaan."

Pemerintah Jerman juga mengisyaratkan akan menindak lebih tegas penyelundup manusia. Faeser berucap, rencananya sebagian besar pelanggaran yang melibatkan penyelundupan manusia bakal dijera dengan hukuman minimal satu tahun penjara. Sebelumnya hanya enam bulan penjara.

Undang-undang yang baru

diperkirakan akan menjatuhkan hukuman antara 10 tahun hingga penjara seumur hidup untuk penyelundupan manusia yang mengakibatkan kematian.

"Dalam semua kasus pelanggaran penyelundupan, polisi berhak menyadap ponsel tersangka penyelundup", tambah mendagri Faeser.

Proposal undang-undang baru ini muncul, di saat pemerintahan koalisi yang berkuasa berada di bawah tekanan besar untuk mengatur dan mengurangi arus migrasi, karena jumlah kedatangan pencari suaka terus meningkat.

Kabinet Jerman pekan lalu menyetujui undang-undang yang dirancang untuk memudahkan pihak berwenang melakukan deportasi terhadap individu yang permintaan suakanya ditolak.

Undang-undang tersebut dikritik tajam oleh kelompok

hak asasi manusia dan sayap pemuda Partai Hijau karena dianggap "tidak manusiawi".

Kanselir Jerman Olaf Scholz dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan perdana menteri dari 16 negara bagian Jerman pada hari Senin (06/11) depan, di mana isu migrasi diperkirakan menjadi agenda utama.

Partai oposisi konservatif Kristen Demokrat, CDU, menang dalam beberapa pemilu berbagai alasan, misalnya sakit, tidak dapat dideportasi. Mereka dapat diberikan izin bekerja di masa depan, kata Faeser.

Orang yang permohonan suakanya gagal tetapi karena berbagai alasan, misalnya sakit, tidak dapat dideportasi. Mereka dapat diberikan izin bekerja di masa depan, kata Faeser.

Mereka yang berasal dari negara yang dianggap sebagai "negara asal yang aman" dan tidak memiliki alasan untuk tinggal, atau menolak untuk

mengungkapkan identitas mereka, tidak akan diizinkan untuk bekerja.

Ironisnya, ketika pemerintah Jerman berjuang mengatasi masalah tingginya arus kedatangan pencari suaka baru, pemerintah juga bergulat dengan masalah kekurangan tenaga kerja terampil. Faeser mengatakan undang-undang yang disetujui oleh Kabinet Jerman pada hari Rabu kemarin itu penting agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat.

"Hal ini terutama berkaitan dengan orang-orang yang sudah ada di sini, di mana kami pikir memasukkan mereka ke dunia kerja lebih awal karena alasan integrasi akan sangat membantu dan tentu saja, hal ini akan membuat masyarakat setempat lebih menerima mereka, jika orang-orang yang datang ke sini juga bekerja," pungkasknya. **tom**

## Presiden Jerman Minta Maaf Kekejaman Era Kolonial di Tanzania

**TANZANIA(IM)** - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier meminta maaf atas kekejaman era kolonial yang dilakukan oleh pasukan Jerman di Tanzania selama kunjungan ke negara Afrika Timur.

"Sebagai Presiden Jerman, saya ingin meminta maaf atas perbuatan orang Jerman terhadap nenek moyang Anda di sini," terang Steinmeier, yang memulai kunjungan tiga hari ke Tanzania pada Senin (30/10), kepada keturunan pahlawan perang setempat Songea Mbandi, dikutip CNN.

Mbandi digantung dan dipenggal bersama puluhan pejuangnya karena melakukan pemberontakan, yang dikenal sebagai pemberontakan Maji-Maji, melawan Jerman pada awal 1900-an.

Diperkirakan 300.000 orang - sekitar sepertiga dari penduduk pribumi pada saat itu - terbunuh dalam pemberontakan tersebut, yang dipicu oleh penindasan brutal terhadap penduduk oleh penjajah Jerman.

Tanganyika, yang sekarang bernama Tanzania, pertama kali merupakan koloni Jerman sebelum berada di bawah kendali Inggris pada tahun 1919.

"Perbuatan kejam ini telah meninggalkan bekas selama beberapa generasi," lanjut Steinmeier kepada keluarga Mbandi di Museum Maji Maji di Songea, Tanzania selatan, menurut transkrip pidatonya yang diberikan oleh kepresidenan Jerman.

"Itu membuatku malu. Saya malu dengan apa yang dilakukan tentara kolonial Jerman terhadap nenek moyang Anda dan rekan-rekan prajuritnya," tambahnya, namun tidak menyebutkan reparasi. Steinmeier mengatakan

kepada keluarga Mbandi di Tanzania bahwa negaranya akan berupaya menemukan jenazah Mbandi, yang mungkin telah diangkut ke Eropa oleh pasukan Jerman untuk dimakamkan setelah eksekusinya.

"Yang kami tahu adalah banyak peninggalan dari Afrika Timur yang dibawa ke Jerman saat itu dan ditempatkan di museum dan koleksi antropologi. Ratusan, bahkan mungkin ribuan tengkorak," ujarnya.

"Saya berjanji bahwa kami akan bekerja sama dengan Anda untuk menemukan tengkorak Kepala Suku Songea di Jerman," tambahnya.

Steinmeier juga melakukan perjalanan ke Zambia pada Rabu (1/11), dengan kedua kunjungan tersebut bertujuan untuk membina kemitraan, menurut pemerintah Jerman.

Hal ini bertepatan dengan tur Kanselir Jerman Olaf Scholz ke Afrika Barat pada awal pekan ini. Scholz mengunjungi Nigeria dan Ghana di mana dia mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin negara tersebut.

Warga Tanzania pun langsung memberikan reaksi di media sosial terhadap permintaan maaf Steinmeier.

"Meminta maaf saja tidak cukup. Jerman harus membayar ganti rugi," tulis salah satu warganet. Jerman sebelumnya telah mengakui kekejaman era kolonialnya di Afrika.

Pada 2021, mereka mengumumkan dukungan sebesar 1,1 miliar euro kepada keturunan korban genosida era kolonial yang dilakukan terhadap kelompok etnis Herero dan Nama di Namibia, bekas jajahan Jerman lebih dari seratus tahun yang lalu. **gul**

## UNICEF: 3.500 Anak Terbunuh dan 6.800 Terluka di Gaza saat Pemboman Israel

**GAZA(IM)** - Badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNICEF mengatakan jumlah anak-anak yang terbunuh mencapai 3.500 orang dan lebih dari 6.800 anak dilaporkan terluka selama 25 hari pemboman yang berkelanjutan Israel yang sedang berlangsung di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

Unicef mencatat lebih dari 400 anak terbunuh atau terluka setiap hari akibat pemboman Israel.

Unicef kembali mengulangi seruan untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan. "Ini tidak bisa menjadi hal normal baru," terangnya, dikutip CNN.

"Anak-anak sudah menanggung terlalu banyak penderitaan. Pembunuhan dan penahanan anak-anak harus dihentikan. Anak-anak bukanlah target," kata pernyataan itu, yang dirilis setelah serangan udara

Israel yang mematikan di hari kedua berturut-turut di kamp pengungsi Jabalya di Gaza utara.

"Pemandangan pembantaian yang terjadi di kamp Jabalya di Jalur Gaza setelah serangan kemarin dan hari ini sungguh mengerikan dan mengerikan," lanjutnya.

Badan PBB tersebut mengatakan belum memiliki perkiraan jumlah korban tewas anak-anak di kamp tersebut. Pejabat medis di lapangan mengatakan kepada CNN bahwa ratusan orang terluka dan tewas, termasuk banyak anak-anak, setelah serangan udara tersebut.

Unicef menegaskan kamp-kamp pengungsi dilindungi berdasarkan hukum internasional dan "pihak-pihak yang berkonflik" mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melindungi warga sipil dari serangan.

"UNICEF menegaskan kembali seruan mendesak kami kepada semua pihak yang berkonflik untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan, untuk memastikan perlindungan semua anak, dan untuk akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan untuk memberikan bantuan penyelamatan nyawa dalam skala besar di seluruh Jalur Gaza, sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. kata pernyataan itu.

Sementara itu, militer Israel mengatakan pihaknya menargetkan dan membunuh beberapa anggota Hamas di kamp tersebut dan menyatakan pihaknya melakukan segala cara untuk meminimalkan korban sipil.

Hamas pada Selasa (31/10) membantah keras kehadiran salah satu komandannya di kamp tersebut. **ans**



### BADAI CIARAN SEBABKAN PEMADAMAN LISTRIK BESAR-BESARAN DI INGGRIS

Orang-orang berjalan di Jembatan Westminster di pusat kota London, Inggris, Kamis (2/11). Badai Ciaran menerjang Inggris dan lebih dari 300 sekolah di Inggris selatan telah ditutup karena ada peringatan bahwa badai tersebut dapat mengancam jiwa.

## Biden Serukan 'Jeda' Genosida Gaza untuk Pertama Kalinya

**WASHINGTON(IM)** - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah menyerukan dukungannya untuk "jeda" kemanusiaan terhadap genosida yang terjadi di Gaza. Sementara Amerika Serikat terus mendesak untuk mengevaluasi seluruh warganya yang terjebak di daerah kantong Palestina yang terkepung tersebut.

"Saya pikir kita perlu jeda," kata Biden dikutip dari Aljazeera dalam sebuah pidato kampanye pada hari Rabu, (1/11), setelah diinterupsi oleh seorang pengunjung rasa yang mendesak agar gencatan senjata segera dimulai di Gaza.

Pernyataan pemimpin AS tersebut menandai pergeseran posisi Gedung Putih, yang sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak akan mendikte bagaimana Israel melakukan operasi militernya.

Ketika ditanya apa arti jeda, Biden mengatakan bahwa ini adalah "waktu untuk mengeluarkan para tawanan" - merujuk pada tawanan yang ditahan oleh Hamas, kelompok yang memerintah Gaza, demikian penjelasan Gedung Putih.

Pada hari Jumat pekan lalu, (27/10), AS adalah salah satu dari 14 negara di PBB yang memberikan suara "tidak" pada resolusi di Majelis Umum yang menyerukan "gencatan senjata".

AS sejauh ini merupakan sekutu terkuat Israel, yang mengirimkan bantuan miliaran dolar setiap tahunnya. Bantuan ini untuk mendukung serangan militer Israel yang sedang berlangsung. Biden telah meminta Kongres untuk menyetujui paket bantuan militer senilai 14,3 miliar dolar AS, untuk negara tersebut.

Tekanan kepada Biden semakin meningkat dari banyak pihak. Tekanan berasal dari para aktivis hak asasi manusia, sesama pemimpin dunia, dan bahkan anggota Partai Demokrat. Biden juga menghadapi reaksi keras dari warga Amerika keturunan Arab-konstituen penting dalam Partai Demokrat-karena dukungan yang kuat terhadap Israel. **ans**

## Ketua Menteri Delhi Diperiksa Soal Kasus Korupsi dan Penjualan Miras

**INDIA(IM)** - Arvind Kejriwal, Ketua Menteri Delhi dan pemimpin Partai Aam Aadmi (AAP) yang berkuasa, akan diperiksa oleh badan kejahatan keuangan India.

Direktorat Penegakan Hukum (ED) sedang menyelidiki dugaan kasus penipuan terkait dengan kebijakan penjualan minuman keras yang kini dihapuskan di negara bagian tersebut.

Pemimpin AAP Manish Sisodia dan Sanjay Singh telah ditangkap dalam kasus ini.

AAP membantah tuduhan terhadap para pemimpinnya dan menuduh pemerintah federal melakukan balas dendam politik.

Namun Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India menuduh AAP terlibat dalam praktik korupsi demi keuntungan politik.

Pertanyaan tentang korupsi adalah masalah sensitif bagi Partai Aam Aadmi, yang muncul lebih dari 10 tahun lalu dari gerakan besar melawan korupsi, dan Kejriwal digambarkan sebagai "pejuang anti-korupsi".

Kantor berita ANI melaporkan, beberapa jam sebelum pemeriksannya pada Kamis (2/11), Kejriwal menyebut pemanggilan ED tersebut ilegal dan bermotif politik.

"Pemberitahuan itu dikirim atas perintah BJP. Pemberitahuan itu dikirim untuk memastikan bahwa saya tidak bisa ikut kampanye pemilu di empat negara bagian," katanya dan meminta ED untuk segera mencabut pembentahan itu.

Keamanan ditingkatkan di luar rumah Kejriwal, kantor ED, serta di Rajghat, tempat peringatn pemimpin kemerdekaan India Mahatma Gandhi, di mana Kejriwal diperkirakan akan berkunjung sebelum diinterogasi.

Namun, beberapa laporan, yang mengutip sumber-sumber AAP, mengatakan bahwa ia mungkin akan melewatkan sidang dan berkampanye di negara bagian Madhya Pradesh di mana pemilu penting akan diadakan akhir bulan ini. Tidak jelas apa yang akan terjadi kemudian.

Badan investigasi terkemuka India Biro Investigasi Pusat (CBI) dan ED menuduh ada kejanggalaan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan minuman keras.

Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah AAP pada 2021 dan ditarik kurang dari setahun kemudian.

Para penyelidik menyatakan bahwa mereka lebih menyukai pengedar minuman keras tertentu dan keuntungan ilegal tersebut digunakan oleh AAP untuk mendanai kampanye pemungutan suara. Tuduhan ini dibantah keras

oleh AAP.

Pada April lalu, Kejriwal diinterogasi oleh CBI selama sembilan jam sehubungan dengan kasus tersebut. Saat itu, dia mengatakan bahwa seluruh kasus tersebut "dibuat-buat" dan dirancang untuk "menjatuhkan" partainya.

AAP telah berusaha memposisikan dirinya sebagai kekuatan oposisi utama terhadap BJP - selain berkuasa di Delhi dan Punjab, partai ini juga ikut serta dalam pemilu di Goa tahun ini dan berencana untuk melakukan hal yang sama di tiga negara bagian lainnya.

CBI dan ED melapor kepada pemerintah federal, dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Banyak pemimpin oposisi, termasuk Kejriwal, menuduh BJP menggunakan lembaga-lembaga federal untuk menargetkan mereka menjelang pemilihan umum pada 2024, sebuah tuduhan yang dibantah oleh partai yang berkuasa.

Laporan mengatakan AAP telah merencanakan langkah-langkah di masa depan jika Kejriwal ditangkap.

"Hal ini akan diputuskan oleh para pemimpin senior partai. Namun jika seluruh partai dipenjara, maka pemerintah dan partai tersebut akan lari dari penjara," kata pemimpin AAP Saurabh Bhardwaj kepada media pada Rabu (1/11).

Pada Mei lalu, ED telah menangkap mantan menteri kesehatan Delhi Satyendra Jain dalam kasus pencucian uang. Dia dibebaskan dengan jaminan karena alasan kesehatan.

Sisodia, mantan wakil ketua menteri negara bagian itu, ditangkap pada Februari lalu dalam kasus kebijakan minuman keras.

Sedangkan anggota parlemen partai Sanjay Singh ditangkap dalam kasus yang sama bulan lalu. Mereka tetap dipenjara karena permohonan jaminan mereka ditolak oleh pengadilan.

Pada Kamis (2/11), beberapa jam sebelum Kejriwal diinterogasi, Departemen Kesejahteraan Sosial menggeledah rumah Menteri Kesejahteraan Sosial Delhi Raaj Kumar Anand dan sembilan tempat lain yang terkait dengannya dalam kasus pencucian uang terpisah. **ans**

**PT Berkat Teknologi Bersama ("Perseroan")**  
Pengumuman Rencana Pengambilalihan Saham

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana untuk mengalihkan seluruh dan/atau sebagian besar hak kepemilikan atas saham Perseroan kepada pihak ketiga.

Pengalihan atas saham di atas merupakan pengambilalihan langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur di dalam Pasal 125 ayat (1) UUPT.

Kreditor yang berkeberatan dengan rencana pengambilalihan saham-saham Perseroan tersebut diatas, bisa ada, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Pengumuman ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah kepada Direksi Perseroan, melalui alamat berikut ini:

PT Berkat Teknologi Bersama  
Alamat: Etnovik Office Suites Lantai 6  
Unit B632 & B645, Komplek Rasuna Said, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Jakarta, 4 November 2023  
Direksi

**PT Berkat Teknologi Bersama**